

**KONSEP DEMOKRASI**  
**MENURUT HIZBUT TAHRIR INDONESIA**  
**(Analisis *Tafsir Al-wa'ie* Karya Rokhmat S. Labib)**

**SKRIPSI:**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Dalam Progam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**Oleh:**

**Nur Azizah**  
**E93216078**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILASAFAT**  
**UIN SUNAN AMPEL**  
**SURABAYA**  
**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nur Azizah  
Nim : E93216078  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Desember 2019




## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi berjudul “Konsep Demokrasi Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis *Tafsir Al-wa’ie* karya Rokhmat S. Labib)” yang ditulis Oleh Nur Azizah ini telah disetujui pada tanggal 16 Desember 2019

Surabaya, 16 Desember 2019

Pembimbing I



H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M. HI  
NIP: 197503102003121003

Pembimbing II



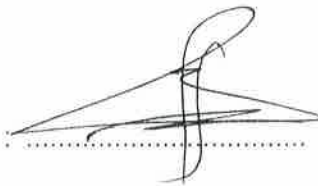
Fejrian Yazdajird Iwanebel, S. Th. I, M.Hum  
NIP: 199003042015031004

## PENGESAHAN SKRIPSI

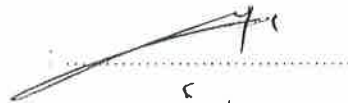
Skripsi berjudul “Konsep Demokrasi Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis *Tafsir Al-wa'ie* karya Rokhmat S. Labib)” yang ditulis Oleh Nur Azizah ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 23 Desember 2019

### TIM Penguji:

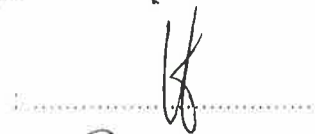
1. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc., M. HI (Ketua) :




2. Drs. Umar Faruq, MM (Sekretaris)




3. Dr. Hj. Iffah, M.Ag (Penguji I)



4. Dr. H. Abd Kholid, M.Ag (Penguji II)



Surabaya, 23 Desember 2019  
Dekan,

  
Dr. Kunawi, M. Ag

NIP. 196409181992031002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Azizah  
NIM : E93216078  
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
E-mail address : azizahnganjuk4@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi    ☐ Tesis    ☐ Desertasi    ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

« **Konsep Demokrasi Menurut Hizbut Tahrir Indonesia (Analisis Tafsir Al-wa'ie Karya Rokhmah S. Labib) »**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019

Penulis

( Nur Azizah )  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Azizah, Nur (2019) *Konsep Demokrasi Menurut Hizbut Tahrir Indonesia*

*(Analisis Tafsir Al-wa'ie karya Rokhmat S. Labib)*

Seiring dengan perkembangan zaman, demokrasi yang dikenal berasal dari Barat ini sudah hampir diterapkan di seluruh negara dewasa. Akibatnya baik asumsi, teori maupun praktiknya memunculkan beragam jenis perbedaan, salah satunya sering kali disamakan dengan konsep *shūrā* (musyawarah). Selain itu di dalam Alquran sendiri tidak ada penyebutan kata demokrasi secara monolitik. Hal inilah yang masih menjadi perbincangan baik di kalangan para ulama maupun para mufassir. Salah satu mufassir yang berkomentar atas hal ini ialah Rokhmah S. Labib dalam tafsirnya *Al-wa'ie*.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini ialah mengenai konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-wa'ie*, serta implikasinya di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-wa'ie*, serta implikasinya di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian *Library Reseach* (kepuustakaan) serta menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Sumber penelitian ini adalah kepustakaan dengan pengumpulan data teknik dokumentasi serta analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah *shūrā* yang dimaksud dalam surah Asy-syuura ayat 37 dan 38 pada *Tafsir Al-wa'ie* karya Rokhmat S. Labib berbeda dengan sistem demokrasi. Sebab konsep *shūrā* menurutnya, merupakan sebuah konsep musyawarah yang berasal dari syara' (agama Islam) sementara demokrasi sistem dan prinsip-prinsipnya terlahir dari Barat yang bertentangan dengan Agama Islam. Namun, secara implikasi, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menerapkan baik sistem demokrasi maupun *shūrā*. Sebab, demokrasi yang diterapkan ialah demokrasi Pancasila, yang mana di dalamnya terdapat konsep musyawarah mufakat, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, terdapat rasatanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian, tafsir ini tergolong tafsir tematik yang berdasarkan tema-tema tertentu, dengan rincian setiap tema metode yang digunakan adalah tahlili dengan sumber rujukan mengambil dari berbagai pendapat para mufassir lainnya.

**Kata kunci:** Al-wa'ie, Rokhmat S. Labib, Demokrasi.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN .....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Kerangka Teoritik.....	6
G. Telaah Pustaka .....	7
H. Metodologi Penelitian .....	9
1. Model dan Jenis penelitian .....	10
2. Metode penelitian .....	10
3. Sumber data .....	11
4. Metode pengumpulan data .....	12
5. Metode analisis data .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II: DEMOKRASI DAN LATAR BELAKANG TAFSIR DI INDONESIA PASCA REFORMASI.....	15
A. Konsep Demokrasi.....	15
1. Pengertian demokrasi.....	15
2. Sejarah demokrasi .....	17
3. Prinsip-prinsip demokrasi .....	19
4. Norma-norma dalam berdemokrasi .....	19
5. Jenis-jenis demokrasi .....	20
6. Demokrasi di Indonesia .....	21
7. Demokrasi dan Islam .....	23
B. Tafsir di Indonesia Pasca Reformasi .....	26
BAB III: BIOGRAFI ROKHMAT S. LABIB DAN TAFSIR AL-WA'IE.....	36
A. Biografi Rokhmat S. Labib.....	36
B. Tafsir Al-wa'ie.....	38
1. Karakteristik Tafsir Al-wa'ie .....	38
2. Latar belakang Tafsir Al-wa'ie .....	40
3. Metode Tafsir Al-wa'ie .....	43







## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, konsep demokrasi sudah hampir diterapkan diseluruh negara, khususnya pada negara dewasa. Oleh karena itu, konsep demokrasi baik dari segi teori maupun praktiknya menimbulkan banyak aspek dengan sistem yang berbeda, termasuk dari asumsi penafsiran yang beragam.<sup>1</sup>

Secara umum, dalam Islam tidak ada pemaknaan demokrasi secara monoritik bahkan di dalam Alquran sendiri juga tidak ada penyebutan kata demokrasi. Oleh karena itu, banyak tokoh Islam yang bermunculan dan tertarik untuk mengangkat pembahasan ini dalam ruang lingkup kajian Islam, salah satunya tokoh Islam dari kalangan mufassir, terlebih pada mufassir kontemporer.

<sup>2</sup>Ibid.

Selain itu, untuk bisa dan selalu berdialog dengan Alquran merupakan tujuan utama dari umat muslim, sebab dalam dinamika kajian tafsir, hal ini menjadi salah satu bagian dari spirit mereka serta juga dapat menjadi respon terhadap problem sosial.<sup>4</sup> Oleh karena itu, sejarah tafsir Alquran pada era modern ini telah banyak bermunculan dan melahirkan para tokoh-tokoh muslim dalam bidang tafsir, seperti Rokhmat S. Wajid dalam karya tafsirnya *Al-wa'ie*.

<sup>3</sup>Lutfiyatun Nikmah, *Penafsiran Ṭahīt Ibn ‘Asyūr Terhadap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi (Kajian Atas Tafsir al-Tāhīr wa al-Tanwīr)*, Tesis UIN Walisongo Semarang, 2017, 219.

[illegible]

Pada mulanya penafsiran ini hanya sebuah kumpulan tulisan yang setiap bulannya dimuat dalam media dakwah dan politik Al-wa'ie dengan berbagai macam tema-tema tertentu *seperti Islam Sebagai Rahmatan lil 'Ālamīn, Kedudukan Manusia di Muka Bumi dan Kewajiban Tegaknya Khilafah, Kewajiban Mendirikan Partai Politik, Syura Bukan Demokrasi*, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Hal yang menjadi daya tarik dari penelitian ini adalah terkait dengan pandangan Rokhmat terhadap konsep demokrasi dalam *Tafsir Al-wa'ie*.

<sup>5</sup>Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, Cet. I (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2013), 7.

[illegible]

Berbeda halnya dengan penafsiran Hamka, menurutnya makna dari potongan surah asy-Syuura ayat 38 yakni “*wa amruhum shūrā bainahum*” berarti perintah bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan baik urusan pribadi maupun urusan bersama dalam hal ini disebut sebagai demokrasi atau gotong royong.<sup>8</sup> Dari sini dapat dipahami, bahwa menurut Hamka, hakikat dari menerapkan demokrasi berarti juga menerapkan musyawarah, sebab di dalam berdemokrasi juga terdapat musyawarah.

<sup>7</sup>Ainur Rofiq al-Amin, *Khilafah HTI Dalam Timbangan*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Harakatuna, Juli 2017), 43.

[illegible]



## E. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis signifikansi dari penelitian ini ialah guna menambah wawasan atau ilmu pengetahuan tentang konsep demokrasi di dalam *Tafsir Al-wa'ie* karya Rokhmat S. Labib, terlebih pada ruang lingkup keilmuan tafsir. Sementara secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menggunakan *Tafsir Al-wa'ie* sebagai bahan referensi atau rujukan dalam ilmu pengetahuan khususnya pada pembahasan konsep demokrasi dalam perspektif Rokhmat S. Labib.

## F. Kerangka Teoritik

Dalam pendekatan tekstual, letak praktik tafsirnya lebih berorientasi pada teks dalam dirinya. Sementara kontekstualisasi suatu teks lebih dilihat hanya sebagai posisi suatu wacana dalam konteks internalnya atau inter teks. Adapun teks yang dipahami dalam hal ini merupakan fiksasi atau pelembagaan wacana lisan yang berbentuk tulisan. Penggunaan kata ini pada Alquran secara sederhana dapat dipahami sebagai pembaca. Sementara wacana merupakan sebuah media yang digunakan untuk proses dialog antara berbagai individu guna memperkaya pengetahuan serta pemikiran dalam rangka mencari kebenaran yang tertinggi.<sup>9</sup>

Pandangan yang lebih maju terkait ini ialah bahwa dalam memahami teks atau suatu wacana, seseorang harus melacak konteks penggunaannya pada masa dimana teks itu muncul. Ahsin Muhammad misalnya, menegaskan bahwa

<sup>9</sup>M. Solahudin, Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran, Al-Bayan-Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 2 desember 2016.





## G. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti, bahwa penelitian mengenai *Tafsir Al-wa'ie* sudah ada yang meneliti, akan tetapi isi daripada pembahasannya hanya mengerucut pada kritik penafsirannya saja, selain itu pembahasan mengenai konsep demokrasi juga sudah banyak yang mengkaji, di antaranya sebagai berikut:

1. Kritik Atas Penafsiran Ayat-Ayat Khilafah: Studi Tafsir *Al-wa'ie* karya Rokhmat S. Labib, karya Lufaei, artikel pada jurnal IIQ Fakultas Ushuluddin STFI Sadra Jakarta, Volume 1, Nomor 1, bulan Juli tahun 2018. Pada artikel jurnal ini fokus menganalisis mengenai ayat-ayat tentang khilafah di dalam *Tafsir Al-wa'ie*. Yang menurutnya penafsirannya telah dibelokkan kepada sesuatu makna yang bukan maksud dari ayat itu sendiri dengan melalui pendekatan konten dan konteks. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penafsiran pada ayat-ayat *khilafah* dalam *Tafsir Al-wa'ie* menurutnya sudah jauh keluar dari esensi ayat serta berbeda dengan penafsiran dari para ulama, bahkan bertolak belakang dengan apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Menurut pentransformasian pada ayat *khilafah* ini memperlihatkan keterpaksaan Labib dalam menafsirkan ayat sesuai dengan porsi kelompoknya yaitu HTI. Oleh karena itu tafsir ini menurut peneliti haram untuk dilakukan, sebab hakikat tafsir ialah mengungkapkan maksud

kepentingan kelompoknya.<sup>12</sup>

3. Demokrasi Perspektif HTI Versus Religious Mardomsalari Ala Muslim Iran, Karya Ainur Rofiq al-Amin, Jurnal Islamica Studi Keislaman, Volume 8, Nomor 1, bulan September tahun 2013. Dalam penelitian ini fokus mengkaji tentang respon kepemimpinan HTI terhadap penolakannya pada demokrasi, alasan ditolaknya sistem kepemimpinan HTI oleh demokrasi, serta menganalisis terkait praktik *religious democracy* di Iran. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif *research*. Hasil kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa demokrasi dalam pandangan HTI sejatinya suatu realitas yang

Labib,Jurnal IIQ, Volume I. Nomer I, Juli 2018.

<sup>13</sup>Farah Farida, PotretTafsir Ideologis di Indonesia: Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan al-Wa'ie, Jurnal Nun Volume 3, Nomer 1, 2017.



### *1. Model dan Jenis penelitian*

Model pada penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah.<sup>15</sup> Sementara kategori jenis penelitian *Library Reseach* (kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bahan-bahan atau literatur sumber datanya mengambil dari perpustakaan baik berupa buku-buku, ensiklopedia, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, kamus, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

## 2. Metode penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan di dalam sebuah proses penelitian. Sementara penelitian adalah upaya dari ilmu pengetahuan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta serta prinsip dengan hati-hati dan sistematis guna memperoleh suatu kebenaran.<sup>17</sup> Dengan demikian pengertian metode penelitian secara definitif yaitu suatu tuntunan mengenai bagaimana cara untuk menentukan penelitian secara urut, menggunakan bahan apa, serta bagaimana prosedurnya.<sup>18</sup>

Adapun metode dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Sementara dalam pelaksanaannya metode ini sifatnya lebih subjektif, sebab dalam proses penelitiannya lebih fokus pada landasan teori.

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

<sup>16</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Kepustakaan, Jurnal Iqra'*, Volume 08, Nomer 1, Mei 2014, 68.

<sup>17</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. V (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 24.

<sup>18</sup>Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

Karena penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan berasal dari sumber yang tertulis, seperti buku-buku, majalah, ensiklopedia, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya. Berikut sumber data pada penelitian ini:

a. Sumber primer yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kitab *Tafsir Al-wa'ie*.

b. Sumber sekundernya berupa:

- 1) Alquran
- 2) *Khazanah Tafsir Indonesia* karya Islah Gusmian
- 3) *Pasaraya Tafsir Indonesia* karya Nurdin Zuhrdi
- 4) Jurnal, buku-buku, karya-karya tafsir dan lain sebagainya yang pembahasannya berkaitan dan relevan dengan pembahasan pada penelitian ini.

#### 4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah proses dimana digunakan untuk mengetahui keakuratan hasil akhir dari penelitian yakni dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data baik dengan menggunakan ctakan fisik maupun digital.

## 5. Metode analisis data

Dalam tahap menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis yaitu jenis penelitian yang mendeskripsikan

kerangka awal mulai dari apa yang dimaksud dengan bagaimana konsep demokrasi menurut Rokhmat S. Labib, serta bagaimana implikasi penafsirannya konsep demokrasi yang ada di Indonesia.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah tahap penyusunan skripsi, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan di bawah ini sebagai berikut:

## BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat beberapa gambaran secara global mengenai penelitian ini diantaranya, latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: DEMOKRASI DAN LATAR BELAKANG TAFSIR DI INDONESIA  
PASCA REFORMASI

Adapun dalam bab ini, akan dibahas mengenai, konsep demokrasi serta tafsir di Indonesia pasca reformasi.

BAB III: BIOGRAFI ROKHMAT S. LABIB, *TAFSIR AL-WA 'IE* DAN HTI

Dalam bab ini akan dikupas mengenai beberapa pembahasan di antaranya, biografi Rokhmat S. Labib, *Tafsir Al-wa'ic*, Hizbut Tahrir Indonesia.

#### BAB IV: KONSEP DEMOKRASI DALAM *TAFSIR AL-WA'IE*

Dalam bab ini fokus pembahasannya terkait dengan analisis data pada penelitian ini, di antara pembahasannya ialah konsep demokrasi, serta implikasi konsep demokrasi di Indonesia





### A. Konsep Demokrasi

Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti *demos* (rakyat) dan *cratos* atau *cratein* (pemerintah atau kekuasaan). Jika digabung *demos-cratein* atau *demos-cratos* berarti suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>1</sup> Sementara secara terminologis demokrasi berarti pemerintahan rakyat yang berarti suatu pemerintahan dimana rakyatnya memegang peranan penting.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>A. Ubaedillah, Abdul Rozak, DKK, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Cet V (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 36.

<sup>2</sup>Srijanti, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, Cet I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),47.

<sup>3</sup>Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, Cet II (Jakarta: Februari 2017), 31.







### 3. Prinsip-prinsip demokrasi

Menurut Robert A. Dahl terdapat beberapa prinsip dalam demokrasi di antaranya sebagai berikut:

- a. Terdapat kontrol atas keputusan dari pemerintah.
- b. Pemilihan yang jujur dan teliti.
- c. Terdapat hak milih dan dipilih.
- d. Adanya kebebasan berpendapat tanpa disertai ancaman.
- e. Bebas dalam mengakses informasi.
- f. Dan lain-lain.<sup>14</sup>

#### 4. Norma-norma dalam berdemokrasi

Menurut Nurcholis Madjid, bahwa setidaknya dalam berdemokrasi terdapat tujuh norma dasar, di antaranya:

- a. Kesadaran akan pluralisme
- b. Musyawarah
- c. Mufakat yang sehat dan jujur
- d. Kerja sama
- e. Pemenuhan dalam segi ekonomi
- f. Pertimbangan moral
- g. Pendidikan yang menunjang.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Srijanti, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*, 51.

33. Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*,

### 5. *Jenis-jenis demokrasi*

Berikut jenis-jenis dalam demokrasi, di antaranya:

- a. Demokrasi berdasarkan dalam cara menyampaikan pendapat
  - 1) Demokrasi langsung yaitu rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan atas kebijakan pemerintah.
  - 2) Demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dijalankan melalui rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum.
  - 3) Demokrasi pemilihan dengan pengawasan langsung dari rakyat yaitu campuran dari demokrasi langsung dan tidak langsung. Jadi pemerintah atau wakil rakyat menjalankan tugasnya dengan diawasi langsung oleh rakyat. Sistem demokrasi ini dilaksanakan di Swiss.
- b. Demokrasi berdasarkan titik perhatian serta prioritas.
  - 1) Demokrasi formal atau liberal yaitu menempatkan kedudukan semua orang sama. Dengan hal ini masing-masing individu diberi kebebasan yang luas.
  - 2) Demokrasi material atau sosial-komunis yaitu memandang kedudukan manusia sama dalam hal sosial-ekonomi namun tidak untuk politik.
  - 3) Demokrasi campuran yaitu campuran dari demokrasi formal dan material yang bertujuan untuk mendapatkan persamaan hak dan derajat orang.
- c. Berdasarkan prinsip ideologi
  - 1) Demokrasi liberal yaitu kebebasan individu diprioritaskan, campur tangan pemerintah diminimkan bahkan ditolak.





negara ini, maka harus menerapkan ideologi yang telah disepakati bersama yakni Pancasila.<sup>18</sup>

Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi terdapat dalam rumusan Pancasila yaitu pada sila ke-empat. Di mana isinya menekankan adanya permusyawaratan dan perwakilan yang bertujuan untuk menguatkan negara persatuan, sebab, tujuan didirikannya negara tidak lain bukan karena untuk golongan atau perorangan saja.<sup>19</sup> Seperti halnya dalam pernyataan sidang Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 sebagai berikut:

“... Dasar itu adalah mufakat, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan rakyat. Tetapi kita mendirikan negara “semua untuk semua”, “satu untuk semua”, “semua untuk satu”. Saya yakin, syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.”<sup>20</sup>”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip pokok dalam demokrasi Pancasila yaitu bahwa seluruh kekuasaan dikelola oleh otoritas hikmat kebijaksanaan dan dilakukan dengan cara musyawarah perwakilan. Dengan demikian, prinsip dalam demokrasi ini telah melampaui demokrasi liberal yang dikendalikan oleh otoritas apapun.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, penekanan musyawarah mufakat merupakan salah satu ciri khas dari demokrasi Pancasila, dan merupakan menjadi bagian pembeda dengan demokrasi lainnya termasuk demokrasi liberal. Sebab prinsipnya yang terlalu membebaskan pilihan serta penganut voting

<sup>18</sup>Ibid., 100.

<sup>19</sup>Ibid.<sup>20</sup>Ibid.<sup>21</sup>Ibid.





Abdurrahman Wahid, Amin Rais, Jamaluddin Al-afghani dan lain sebagainya.<sup>23</sup>



<sup>28</sup>Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, Cet I (Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang, 2013), 93.







- c. Gaya bahasa penulisan tafsir di antaranya, gaya bahasa kolom, reportase, ilmiah, populer dan lain-lain

Gaya bahasa penyajian	Sistematika	Bentuk publikasi dan asal-usul naskah
1. Gaya kolom	Tematik plural	Kumpulan tulisan dan pernah dipublikasikan di majalah
2. Gaya reportase	Tematik klasik	a. Kumpulan tulisan dan pernah dipublikasikan di koran b. Tulisan utuh dan belum pernah dipublikasikan
3. Gaya ilmiah	Tematik singular	a. Tulisan utuh dan belum pernah dipublikasikan b. Tulisan akademik contoh skripsi, tesis, disertasi
4. Populer	- Tematik klasik	a. kumpulan tulisan dan disampaikan dalam ceramah b. tulisan utuh dan belum pernah dipublikasikan
	- Tematik plural	Kumpulan tulisan dan disampaikan dalam ceramah serta ditulis di jurnal <i>ulumul quran</i>
	- Runtut sesuai mushaf	Tulisan utuh dan belum pernah dipublikasikan
	- Runtut sesuai turunnya ayat	Kumpulan tulisan dan ditulis di majalah

- d. Bentuk penulisan tafsir ada dua yaitu ilmiah dan non ilmiah

Bentuk-bentuk		Sistematika	Punlikasi dan asal-usul naskah
1. ilmiah	a. Catatan perut	Tematik modern	Kumpulan tulisan pernah dipublikasikan di majalah atau jurnal
	b. Endnote	- Tematik klasik	Kumpulan tulisan pernah dipublikasikan di







Selain itu, hal menarik lainnya dari perkembangan tafsir pada masa ini adalah asal-usul dari penulisan tafsirnya yang beragam, baik yang muncul karena kepentingan akademik, bukan dari kepentingan akademik, merupakan hasil ceramah atau dakwah yang dipublikasikan, maupun muncul dari karya tafsir yang memang belum pernah dipublikasikan.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia*, 209.

[illegible]

Islam terhadap wacana pemikiran pada bidang ke-Islam-an sedang berkembang.<sup>34</sup>

BIOGRAFI ROKHMAT S. LABIB DAN *TAFSIR AL-WA'IE*

Secara sosio historis, Rokhmat S. Labib lahir pada tanggal 26 Juni tahun 1971. Sejak dari kecil hingga lulus SMA tinggal bersama orang tuanya di Tuban, tepatnya di daerah Rangel. Jadi, jika dilihat dari segi riwayat pendidikannya, memang Rokhmat tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Sebab, setelah kelulusan SMA tahun 1989, Rokhmat langsung melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi, tepatnya di IKIP Surabaya (UNESA). Pada saat inilah jiwa aktivisnya dalam mengikuti organisasi mulai terbentuk bahkan hingga menjadi pengurus pada UKKI (Unit Kegiatan Kerohanian Islam). Selama menjadi mahasiswa, keaktifannya dalam mengikuti kajian Islam tidak tanggung-tanggung, mulai dari mempelajari bahasa Arab, fiqh, tafsir, hadits, hingga pada kajian pemikiran Islam yang diadakan secara intensif.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, Cet. I (Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2013), 685.

[illegible]



masuk dalam hal melacak berbagai khazanah yang  
 masa kejayaan Islam. Selain itu, dengan kerangka  
*hiyyah* yang diperoleh dari *halaqah* bersama HTI m  
 untuk mempelari Islam serta mendalami *tsaqāfah* Is  
 hanya itu, Hizbut Tahrir juga membuatnya bisa  
 aikan dakwah di berbagai kota. Hamper semua k  
 hingga Papua pernah dikunjunginya. Bahkan,  
 an Malaysia. Forum yang dihadiri juga berbaaga  
 nar, sarasehan. Worksop, diskusi dialog, kajian,  
 bar.<sup>4</sup>

ntara itu, di sela-sela waktu berdakwah, Rokhmat  
 menyempatkan waktu untuk mendirikan Ma'had Um  
 nya tahun 1997. Adapun kegitannya adalah terd

masuk dalam hal melacak berbagai khazanah yang  
 masa kejayaan Islam. Selain itu, dengan kerangka  
*hiyyah* yang diperoleh dari *halaqah* bersama HTI m  
 untuk mempelari Islam serta mendalami *tsaqāfah* Is  
 hanya itu, Hizbut Tahrir juga membuatnya bisa  
 dakwah di berbagai kota. Hamper semua k  
 hingga Papua pernah dikunjunginya. Bahkan,  
 an Malaysia. Forum yang dihadiri juga berba  
 nar, sarasehan. Worksop, diskusi dialog, kajian,  
 bar.<sup>4</sup>

ntara itu, di sela-sela waktu berdakwah, Rokhmat  
 menyempakan waktu untuk mendirikan Ma'had Um  
 nya tahun 1997. Adapun kegitannya adalah terd

masuk dalam hal melacak berbagai khazanah yang  
 masa kejayaan Islam. Selain itu, dengan kerangka  
*hiyyah* yang diperoleh dari *halaqah* bersama HTI m  
 untuk mempelari Islam serta mendalami *tsaqāfah* Is  
 hanya itu, Hizbut Tahrir juga membuatnya bisa  
 dakwah di berbagai kota. Hamper semua k  
 hingga Papua pernah dikunjunginya. Bahkan,  
 an Malaysia. Forum yang dihadiri juga berba  
 nar, sarasehan. Worksop, diskusi dialog, kajian,  
 bar.<sup>4</sup>

ntara itu, di sela-sela waktu berdakwah, Rokhmat  
 menyempakan waktu untuk mendirikan Ma'had Um  
 nya tahun 1997. Adapun kegitannya adalah terd

masuk dalam hal melacak berbagai khazanah yang  
 masa kejayaan Islam. Selain itu, dengan kerangka  
*hiyyah* yang diperoleh dari *halaqah* bersama HTI m  
 untuk mempelari Islam serta mendalami *tsaqāfah* Is  
 hanya itu, Hizbut Tahrir juga membuatnya bisa  
 dakwah di berbagai kota. Hamper semua k  
 hingga Papua pernah dikunjunginya. Bahkan,  
 an Malaysia. Forum yang dihadiri juga berba  
 nar, sarasehan. Worksop, diskusi dialog, kajian,  
 bar.<sup>4</sup>

ntara itu, di sela-sela waktu berdakwah, Rokhmat  
 menyempakan waktu untuk mendirikan Ma'had Um  
 nya tahun 1997. Adapun kegitannya adalah terd

masuk dalam hal melacak berbagai khazanah yang  
 masa kejayaan Islam. Selain itu, dengan kerangka  
*hiyyah* yang diperoleh dari *halaqah* bersama HTI m  
 untuk mempelari Islam serta mendalami *tsaqāfah* Is  
 hanya itu, Hizbut Tahrir juga membuatnya bisa  
 dakwah di berbagai kota. Hamper semua k  
 hingga Papua pernah dikunjunginya. Bahkan,  
 an Malaysia. Forum yang dihadiri juga berba  
 nar, sarasehan. Worksop, diskusi dialog, kajian,  
 bar.<sup>4</sup>

ntara itu, di sela-sela waktu berdakwah, Rokhmat  
 menyempakan waktu untuk mendirikan Ma'had Um  
 nya tahun 1997. Adapun kegitannya adalah terd

masuk dalam hal melacak berbagai khazanah yang  
 masa kejayaan Islam. Selain itu, dengan kerangka  
*hiyyah* yang diperoleh dari *halaqah* bersama HTI m  
 untuk mempelari Islam serta mendalami *tsaqāfah* Is  
 hanya itu, Hizbut Tahrir juga membuatnya bisa  
 aikan dakwah di berbagai kota. Hamper semua k  
 hingga Papua pernah dikunjunginya. Bahkan,  
 an Malaysia. Forum yang dihadiri juga berbaaga  
 nar, sarasehan. Worksop, diskusi dialog, kajian,  
 bar.<sup>4</sup>

ntara itu, di sela-sela waktu berdakwah, Rokhmat  
 menyempakan waktu untuk mendirikan Ma'had Um  
 nya tahun 1997. Adapun kegitannya adalah terd

masuk dalam hal melacak berbagai khazanah yang  
 masa kejayaan Islam. Selain itu, dengan kerangka  
*hiyyah* yang diperoleh dari *halaqah* bersama HTI m  
 untuk mempelari Islam serta mendalami *tsaqāfah* Is  
 hanya itu, Hizbut Tahrir juga membuatnya bisa  
 aikan dakwah di berbagai kota. Hamper semua k  
 hingga Papua pernah dikunjunginya. Bahkan,  
 an Malaysia. Forum yang dihadiri juga berbaaga  
 nar, sarasehan. Worksop, diskusi dialog, kajian,  
 bar.<sup>4</sup>

ntara itu, di sela-sela waktu berdakwah, Rokhmat  
 menyempakan waktu untuk mendirikan Ma'had Um  
 nya tahun 1997. Adapun kegitannya adalah terd







Adapun contoh ide batil yang terlihat jelas adalah pluralisme agama. Menurutnya, ide tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan ajaran Islam. Sebab kedudukan Agama Islam hakikatnya tidak bisa disetarakan dengan agama buatan manusia yang kufur. Akan tetapi faktanya, kaum Liberal telah lancang mencomot QS. Al-baqarah (2): 62 serta QS. Al-maidah (5): 48 dan 69 untuk kepentingan liberalisme yang batil. Selain itu ayat ini juga diklaim sebagai ayat yang memberikan harapan semua pemeluk agama berupa surga.<sup>11</sup>

Selain itu QS. Al-baqarah (2) 256 juga digunakan sebagai dalil tentang kebebasan beragama. Ide ini, menjelaskan bahwa manusia bebas dalam memeluk agama apapun sesuai dengan kehendak yang disukai. Termasuk bagi yang tidak ber-Tuhan atau tidak memiliki agama juga dianggap sebagai pilihan yang patut untuk dihargai, serta tidak ada pemberian sanksi pada mereka.<sup>12</sup>

Di samping itu, moderatisme merupakan salah satu ide batil yang juga berhasil lolos masuk ke dalam pemikiran umat. Paham ini memiliki titik

<sup>12</sup>Ibid., 4.



*Al-wa'ie* di antaranya sebagai berikut:

Adapun metode yang digunakan dalam tafsir ini adalah *tafsir bi-al-ra'yi* (penafsiran dengan menggunakan logika). Sementara Isiah Gusman menyebutnya sebagai metode intelektualitas (metode tafsir pemikiran). Meskipun pada realitanya tafsir ini juga mengambil sumber rujukan dari Alquran, hadis, *qaul sahabat*, tabi'in, pendapat para mufassir, sejarah nabi dan sahabat, namun pendapat pebulis berdasarkan logika lebih dominan dalam penafsirannya.

1. Sistematika penyajian tafsir termasuk tematik klasik sebab mengacu pada ayat-ayat tertentu. Penulis telah menentukan satu atau dua ayat sebagai sentral penafsiran, yang kemudian dihubungkan dengan ayat Alquran lainnya, seperti tentang judul *Kewajiban Berjilbab* dengan mengangkat surah Al-ahzaba ayat 59 sebagai objek kajian penafsiran, sementara ayat lain yang dijadikan sebagai penjelas adalah surah Al-an'am ayat 159.



2. Bentuk penyajian tafsirnya adalah rinci, sebab uraian dari penulisnya cukup detail serta seringkali disertakan mengenai aspek kebahasaan, seperti pengungkapan keberagaman makna, sebab nuzul, menyertakan berbagai pendapat dari para ulama klasik, kemudian ditutup dengan kesimpulan.
3. Gaya bahasa yang dimuat dalam tafsir ini cenderung pada gaya reportase dengan sistematika tematik klasik. Gaya reportase yaitu bertujuan untuk memikat emosi pembaca serta mengandung ajakan untuk masuk ke dalam idea tau gagasan penulis yang di tuangkan dalam tafsir ini.
4. Bentuk penulisan non ilmiah dengan sistematika tematik modern yang pernah dipresentasikan dalam pengajian.
5. Sifat mufassir individual dengan asal-usul naskah non-akademik serta bentuknya berupa tematik klasik. Sebab *Tafsir Al-wa'ie* asal mula bahannya pernah diceramahkan, kemudian dipublikasikan di media massa yaitu media politik Al-wa'ie.
6. Asal-usul keilmuan tafsir berasal dari non tafsir Alquran. Hal ini sesuai sejarah historis Rokhmat S. Labib yang *begraund* keilmuannya berasal dari bidang ekonomi bukan tafsir Alquran.
7. Asal-usul literatur tafsir berasal dari non-akademik dengan latar belakang berangkat dari bahan ceramah di khalayak umum.
8. Sumber-sumber rujukan berupa buku-buku tafsir klasik dengan berbahasa Arab seperti *Fath Al-qadir* karya Al-syaukani, *Rūh Al-ma'āni* karya Al-



Di samping itu, berdasarkan aspek hermeneutika tafsir Alquran *Tafsir Al-wa'ie* terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Metode tafsir interteks, sebab selain bersumber dari interpretasi mufasir itu sendiri, namun Rokhmat juga mencantumkan teks-teks lainnya berupa karya-karya tafsir klasik lainnya yang berfungsi sebagai pembanding dan penguat. Pada tafsir ini terdapat dua variabel yang menjadi titik tolak dalam metode tafsir ini yaitu variabel sosio-kultural dan struktur linguistik teks. Variabel sosio-kultural dapat dilihat dari sebab nuzul yang berbentuk riwayat. Sementara variabel linguistik teks (aspek kebahasaan) dapat dilihat dari pemaparan keberagaman kosa-kata dari makna yang di tafsirkan.
2. Nuansa tafsir teologis. Pengertian teologi ini lebih dipandang sebagai suatu disiplin keilmuan yang pokok kajiannya membicarakan tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Adapun ranah nuansa teologis yang dimaksud ini adalah mengungkapkan pandangan Alquran secara komprehensif mengenai keyakinan dan teologi. Adanya nuansa ini bertujuan untuk menggali bagaimana Alquran itu secara serius berbicara mengenai teologis melalui pelacakan term atau tema-tema pokok tertentu

<sup>15</sup>Farah Farida, Potret Tafsir Ideologis di Indonesia: Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan al-Wa'ie, Jurnal Nun, Volume 3, Nomer 1, 2017.

Adapun corak *Tafsir Al-wa'ie* cenderung kepada ideologis, sebab penafsirannya dipengaruhi kuat oleh paradigma HTI, hal ini dapat dilihat langsung dari tema-tema yang diangkat serta dari kesimpulan dari hasil akhir penafsirannya, selain itu penulis tafsir ini selalu menghubungkan dengan prinsip *Daulah Islamiyah* yang sesungguhnya yaitu Hizbut Tahrir Indonesia.<sup>17</sup>

### 1. Pengertian dan sejarah HTI

*Hizb al-Tahrīr* pertama kali berdiri pada tahun 1953 di Al-quds Palestina. Ditahun yang sama, gerakan ini mencoba untuk meminta izin kepada Departemen Dalam Negeri Pemerintahan Yordania, namun usahanya gagal dan ditolak serta dilarang, sebab aktivitasnya yang dinyatakan ilegal. Taqi al-Din al-Nabhanī merupakan pendiri sekaligus pemimpin

<sup>17</sup>Ibid.







## KONSEP DEMOKRASI DALAM *TAFSIR AL-WA'IE*

### *1. Penafsiran ayat tentang demokrasi*

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كِبَارَ الْأَيْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَاعِضُبُوهُمْ يُعْمِرُونَ . وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*b. Tafsir ayat*

وَالَّذِينَ يَحْتَسِبُونَ كِبَاءً رَاسِلًا ۖ وَالْفَوَاحِشَ<sup>2</sup>

فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Ibid.

Sementara makna *fawāhis* merupakan bentuk jamak dari *fāhis*. Dalam pandangan Ibnu Mazhur berarti *al-qabīh min al-qawl wa al-fi'il* yang berarti sesuatu yang tercela dan keji baik dari segi perkataan maupun perbuatan.<sup>9</sup> Beberapa contoh perbuatan tersebut ialah *liwath* atau sodomi (QS. Al-a'raf (7):80), QS. Al-naml (27):54), zina (QS. Al-isra' (17):32, menikahi wanita yang dinikahi ayah (QS. Al-nisa' (4):22). Namun secara

<sup>9</sup>Ibid.





Bila disifatkan kepada Allah maka kata tersebut bermakna siksaan ataupun hukuman.<sup>13</sup>

Adapun hasil penafsiran pada potongan ayat ini ialah mayoritas mengutip dari pendapat para mufasir lainnya. Sehingga hasil dari penafsirannyapun juga tidak jauh berbeda dengan penafsiran pada umumnya, sebab HAMKA dan Quraish Shihab juga memaknai potongan ayat tersebut dengan pemaknaan yang hampir sama dengan penafsiran Rokhmat yaitu memberi maaf ketika dalam keadaan marah.

Kemudian dilanjut dengan ayat berikutnya yaitu:

14 . وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ

Maksud dari ayat tersebut ialah orang yang akan mendapatkan kenikmatan salah satunya, mereka yang memenuhi seruan dari Tuhannya. Berdasarkan hasil penafsiran mufassir pada umumnya memang tidak ada perbedaan yang signifikan.

Menurut Fakhruddin al-Razi, potongan ayat tersebut dimaknai *tamām al-inqiyād* yang berarti ketundukan yang sempurna. Sementara Ibnu katsir menggambarkan sikap ketundukan yang dimaksudkan tersebut berarti *mereka yang mengikuti rasul-rasul-Nya, mentaati perintah-Nya, serta menjauhi larangan-Nya*. Penafsiran tersebut tidak jauh berbeda dengan Al-samarqandi yang mengatakan *mereka yang menerima dan taat*

<sup>13</sup>Hamka, *Tafir Al-azhar*, Juz XX, 591.

<sup>14</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan Terjemah Alquran Al-Mujawwad*, 487.



Sementara itu, potongan ayat berikutnya berbicara mengenai konsep musyawarah. Dimana menurut Rokhmat, pada potongan ayat ini, sering kali disangkut pautkan dan diambil untuk dijadikan hujjah dalam berdemokrasi. Padahal demokrasi dan *shūrā* (musyawarah) merupakan sebuah prinsip yang berbeda.

Dalam *Tafsir Al-wa'ie* dijelaskan bahwa musyawarah merupakan termasuk salah satu kategori sifat yang dicirikan kelak akan mendapatkan kedudukan yang lebih baik dan kekal di sisi-Nya.<sup>18</sup> Firman Allah:

19 وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

Dalam *Tafsir Al-wa'ie* kata *shūrā* didefinisikan sebagai bentuk *mashdar* dari kata *shāwara*. Menurut Al-raghib Al-asfahani, *shūra* berarti *al-tasāwur wa al-mushāwarah* yaitu proses mengeluarkan pendapat melalui sebagian orang yang meminta pendapat atau nasihat kepada sebagian lainnya.<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan Terjemah Alquran Al-Mujawwad*, 487.

[illegible]











sesama muslim untuk menyelesaikan urusan bersama dengan cara bermusyawarah.<sup>34</sup>

3. Dalam tafsir kemenag dijelaskan bahwa makna kata *shūrā* pada ayat tersebut berasal dari *fiil* yaitu *shāra-yashūru-mashūrat* atau *shūrā* yang berarti bermusyawarah. Maksud musyawarah di sini adalah menghadapi dan menyelesaikan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Di sisi lain perintah untuk bermusyawarah dalam agama juga ditegaskan dalam perintah surah Al-imraan ayat 159. Selain itu, pelaksanaannya diharapkan secara terbuka dengan melibatkan para ahli, orang-orang yang berhubungan dengan penyelesaian persoalan tersebut serta keputusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan untuk kemaslahatan umat. Jadi dapat dikatakan hampir sama dengan sistem yang ada pada demokrasi, tetapi bedanya tidak selalu dalam proses pengambilan keputusannya dilaksanakan berdasarkan pada suara terbanyak, sebab diharuskan untuk memperhatikan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam agama serta bertujuan untuk kemaslahatan umat.<sup>35</sup>

Adapun musyawarah yang dimaksudkan dalam ayat ini meliputi beberapa urusan, di antaranya tuntunan agama, urusan terhadap manusia, masyarakat, bahkan urusan terhadap hak Tuhan. Dalam perihal pemerintahan, kemasyarakatan agama memerintahkan untuk dimusyawarahkan, namun di dalam Alquran sendiri tidak ada penjelasan mengenai cara yang harus dilakukan dalam musyawarah termasuk dalam hal memilih pemimpin. Berdasarkan sejarah, ketika nabi wafat, dulu para sahabat nabi bermusyawarah antar mereka untuk menentukan siapa khalifah yang akan memimpin umat muslim setelah nabi. Kemudian ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar. Dan tatkala Sayyidina Abu Bakar hendak meninggal ditunjuklah Sayyidina Umar bin Khattab secara langsung, kemudian baru disetujui oleh masyarakat. Namun, lain lagi



rakyat. Sebab, mengingat demokrasi sistem keadaulatanannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sebagaimana dengan pernyataan sebelumnya, terlihat jelas bahwa Rokhmat memang terkesan memaksakan kedudukan Alquran sebagai legitimasi kepentingannya saja, salah satunya dengan menjadikan ayat ini sebagai alasan terhadap respon atau jawaban atas munculnya ide-ide barat yang telah masuk di dunia Islam dan bertentangan dengan Alquran. Selain itu, setelah peneliti melacak dari beberapa sampel sumber tafsir, seperti dalam *Tafsir Al-misbah*, *Tafsir Ibnu Katsir*, *Tafsir Al-azhar*, *Tafsir Kemenag* dan beberapa tafsir lainnya, tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa ayat tentang musyawarah ini khusus ditujukan kepada kaum muslim saja. Adapun penafsiran Rokhmat pada potongan ayat berikutnya ialah:

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ<sup>37</sup>

Potongan ayat ini menunjukkan bahwa salah satu kenikmatan yang telah Allah janjikan adalah mereka yang menginfakkan pada jalan kebaikan serta menshadaqahkan pada orang yang lebih membutuhkan. Dijelaskan pula bahwa ibadah yang wajib mengorbankan harta adalah zakat, sementara yang mandub seperti infak dan sadaqah.<sup>38</sup>

Dalam pengambilan rujukan tersebut, Rokhmat tidak mengambil secara utuh atau secara keseluruhan dari rujukan karya tafsir tersebut, yang

<sup>37</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Tajwid dan Terjemah Alquran Al-Mujawwad.*, 487.

<sup>38</sup>Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, 594.



Sebagaimana dengan penafsiran surah Asy-syuura ayat 37 dan 38 telah dijelaskan bahwa menurut Rokhmat ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam berdemokrasi, sebab ayat tersebut kandungannya berisi mengenai perintah untuk bermusyawarah. Seperti halnya dalam pernyataannya sebagai berikut:

[illegible]





Menyeret ayat ini untuk mengabsahkan demokrasi juga salah besar. Memang benar Allah SWT telah memuji kaum Muslim yang melakukan *shūrā* atau musyawarah dalam urusan mereka. Kata *amruhum* dalam ayat ini –isim jenis *al-amr* dan di-*mudhafa*-kan kepada *dhomīr hum*– pun memberikan makna umum mencakup semua urusan. Sehingga perkara yang di musyawarahkan meliputi semua perkara.<sup>44</sup>

Menurut Rokhmat, *shūrā* dalam ayat ini merupakan kategori perintah yang cakupannya tidak keluar dari batas ketaatan syariat Islam. Selain itu, juga tidak ada unsur untuk memberikan ruang kepada manusia untuk membuat dan menetapkan hukum dengan kehendak masing-masing, seperti demokrasi.

Dalam ayat 37 dan 38 frasa *wa al-ladzīna (i)stajībū li rabbihim* menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman ialah mereka yang menyambut, menerima, serta mematuhi syariah-Nya dengan sifat-sifat yang mereka miliki yaitu mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki, memberi maaf ketika marah, musyawarah, serta menjahui dosa besar dan perbuatan keji. Semua sifat tersebut merupakan sifat orang-orang yang taat kepada syariah serta tidak bersebrangan dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, ketika konteks ayatnya berbicara mengenai pujian terhadap

<sup>44</sup>Rokhmah S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, 596.



Dari sini, Rokhmat menarik kesimpulan bahwa demokrasi jelas tidak bisa disamakan dengan *shūrā*. Sebab demokrasi tidak terlahir dari Islam melainkan dari sekularisme yang termasuk sebuah ideologi yang kafur.<sup>47</sup>

Prinsip demokrasi sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menurut Rokhmat S. Labib sangat bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam Agama Islam. Sebab, dalam prinsip Islam, kedaulatan yang sesungguhnya berada di tangan seorang pemimpin. Maksud pemimpin di sini ialah khilafah islamiyyah dengan sistem pemerintahan Islam.<sup>48</sup>

Sementara dalam prinsip demokrasi, proses pemerintahannya lebih mengedepankan suara mayoritas. Menurut Rokhmat, ketika demokrasi adalah suara mayoritas berarti menunjukkan bahwa kehendak rakyat harus ditaati.<sup>49</sup> Dengan hal ini, sebagai konsekuensinya, setiap rakyat memiliki hak untuk menentukan perjalanannya dalam hidup bermasyarakat, baik dalam menentukan sistem pemerintahan, hukum serta konstitusi yang dirasa cocok untuk mereka. Bahkan keputusan yang telah mereka tetapkan, juga tidak akan mereka perdulikan apakah undang-undang itu sejalan dengan syariah Islam maupun bertentangan dengannya. Sehingga dengan hal ini rakyat juga memiliki hak untuk membatalkan, mengganti maupun mengubah undang-

<sup>47</sup>Ibid., 599.

<sup>48</sup>M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia*, Cet I (Bantul: Kaukaba Dipantara, September 2014), 240.

<sup>49</sup>Ibid., 241.

undang yang telah ditetapkan tersebut. Singkat kata, apapun kehendak rakyat, maka harus dijalankan.<sup>50</sup>

Selain itu, yang menjadi objek perbincangan dalam *Tafsir Al-wa'ie* adalah solusi akhir yang diambil dalam demokrasi yaitu suara terbanyak. Sebab, yang dimaksud rakyat ialah terdiri dari sekumpulan orang, sementara kehendak di antara mereka, satu sama lain bersebrangan, dan yang dijadikan dalam sebuah keputusan adalah suara mayoritas. Dengan demikian menurut Rokhmat, wajar saja demokrasi dianggap bertentangan dengan Islam. Karena ideologi yang terbangun berasal dari ideologi sekuler yang kufur bukan dari agama Islam.<sup>51</sup> Maka dari itu, Rokhmat mengklaim konsep demokrasi sebagai prinsip yang batil dan bertentangan dengan Agama Islam. Sebab, kedaulatan yang sesungguhnya dalam Agama Islam adalah berada di tangan syara' bukan di tangan rakyat.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, jika surah Asy-syuura ayat 37 dan 38 dikaitkan dengan demokrasi, maka secara tegas Rokhmat menyatakan bahwa ayat ini sama sekali tidak berbicara mengenai perintah demokrasi, yang ada ialah berkaitan erat dengan konsep *shūrā*.<sup>53</sup>

Menanggapi pernyataan ini, padahal secara realita, dalam prinsip demokrasi tidak demikian, sebab berdasarkan *Tafsir Kemenag* telah dijelaskan bahwa dalam berdemokrasi ketika proses pengambilan keputusan, penetapannya tidak selalu didasarkan pada suara terbanyak, akan tetapi juga

<sup>50</sup>Rokhmat S. Labib, *Tafsir Ayat Pilihan al Wa'ie*, 533.

<sup>51</sup>Ibid., 534.

<sup>52</sup>M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia*, 241.

<sup>53</sup>Ibid., 241.

harus selalu mempertimbangkan serta memperhatikan prinsip-prinsip yang ada dalam agama serta kemaslahatan umat. Sehingga kekhawatiran terhadap keputusan yang bertentangan dengan agama tidak diragukan lagi.

Adapun yang dimaksud demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bukan berarti setiap kehendak rakyat harus dijalankan, akan tetapi lebih tepatnya pemerintahan dari rakyat berarti merupakan wakil dari rakyat yang telah mendapatkan amanah berupa sebuah kepemimpinan. Sedangkan maksud oleh rakyat berarti hakikat dalam pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Meskipun dalam praktiknya hanya pemerintah yang menjalankan namun kedudukannya sudah mewakili rakyat. Oleh karena itu, pemimpin yang telah terpilih, memiliki hak untuk mengendalikan sebuah sistem dalam pemerintahan, dengan catatan tetap berada dalam pengawasan rakyat. Sementara itu, maksud dari *untuk rakyat* berarti kekuasaan yang telah dipercayakan masyarakat kepada pemimpin harus dilaksanakan sesuai untuk kepentingan rakyat.

Dengan demikian, dalam demokrasi tidak ada indikasi bahwa ketika rakyat berpendapat maka semua kehendaknya harus dilaksanakan, akan tetapi dengan adanya ini maka pengambilan keputusan melalui musyawarah yakni dengan pengambilan suara mayoritas yang kemudian disetujui ialah yang lebih tepat. Selain itu, meskipun rakyat juga memiliki hak untuk membatalkan, mengganti maupun mengubah undang-undang yang telah ditetapkan tersebut. Namun, bukan berarti apapun kehendak rakyat, maka harus dijalankan. Artinya dalam pengambilan sebuah keputusan ketika berdemokrasi,











## PENUTUP

Sebagaimana dalam rumusan masalah, maka hasil dari analisis antara kesesuaian teori dengan data dapat disimpulkan menjadi dua poin di antaranya:

- 76

Dalam setiap penulisan karya pasti tidak bisa terlepas dari yang namanya kekurangan, seperti halnya dalam penulisan skripsi ini. Banyak hal yang pembahasannya masih kurang lengkap, baik dari segi literturnya, penulisannya serta objek pembahasannya maupun lainnya.

[illegible]

## DAFTAR PUSTAKA

- 78

- M. Solahudin. 2 Desember 2016. Pendekatan Tekstual dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran. Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir
- Mustaqim, Abdul. 2012. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Cet. II. Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang
- Nikmah, Lutfiyatun. 2019. Penafsiran Ṭahīt Ibn ‘Asyūr Terhadap Ayat-Ayat Tentang Demokrasi (Kajian Atas Tafsir al-Tāhīr wa al-Tanwīr). *Tesis UIN Walisongo Semarang*
- Nugroho, Setyo. DKK. Desember 2013. Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan. *Jurnal Cita Hukum*. Volume I. Nomer 2
- Rozak, Abdul, A. Ubaedillah. DKK. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Cet V. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- S. Labib, Rokhmat. 2013. *Tafsir Ayat Pilihan al Wa’ie*. Cet. I. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing
- Santoso, Lukman. 2013. Eksistensi Konsep Shūrā Dalam Konstitusional Islam, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Volume 3. Nomer 1
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-mishbāh*. Volume 12. Cetakan 1. Jakarta: Lentera Hati
- Srijanti. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Cet I (Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Asy-syaukānī, bin Muhammmad, bin ‘Alī, Muhammad. 1428H. *Fath Al-qadīr*. Beirut: Dār Al-ma’rifah
- Asy-syawī, Muhammad, Taufiq. 2013. *Fiqhul Shūrā wa Al-ishtisārah*. Terj. Djamaluddin Z. S. Jakarta: Gema Insani
- Syuhadak, Aswadi. 2015. *Teori dan Teknik: Teknik Dalam Dakwah (Debat Diskusi Musyawarah Perspektif Al-Qur’an)*. Cet 2. Surabaya: Dakwah Digital Press
- Al-ṭabrisī, Ibn Al-hasan, Al-fadl, Alī, Abī, Islāmi, Amīn. 2006. *Majma’ Al-bayāni fī Tafsīr al-Qur’ān*. Juz I. Cet I. Beirut: Dār Al-murtadza
- Widi, Kartiko, Restu. 2010. *Metodologi Penelitian*. Cet. I. Yogyakarta: Graha Ilmu



